EnviroScienteae Vol. 19 No. 4, November 2023 ISSN 2302-3708 (online)
Halaman 112-122

ANALISIS KESESUAIAN RTRW PADA BIDANG PERTAMBANGAN BERDASARKAN RTRWP KALIMANTAN SELATAN DAN RTRWK DI KABUPATEN TAPIN

Analysis of RTRW Compatibility in The Mining Sector Based On South Kalimantan RTRWP, and RTRWK in Tapin District

Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono[1*)], Emmy Sri Mahreda[2)], Danang Biyatmoko[3)], Hafiziannor[4)]

[1)] *Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat*
[2)] *Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Lambung Mangkurat*
[3)] *Fakultas Pertanian, Universitas Lambung Mangkurat*
[4)] *Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat*
[*)] *e-mail: roufiq.walhi@gmail.com*

Abstract

As a province rich in natural resources, especially mining products, South Kalimantan (South Kalimantan) is also not free from problems in the environmental sector. The massive mining activity in the province of South Kalimantan has caused environmental damage and loss of land cover in South Kalimantan. This happened because 41 percent of the Meratus forest and other forests in South Kalimantan were already burdened with mining permits. Efforts to balance the use of natural resources and the environment are through spatial planning based on the achievement of environmental function sustainability. The purpose of this study is to analyze the suitability of the RTRW, analyze the factors that influence the suitability of the RTRW, and analyze how big the positive and negative impacts of the suitability of the RTRW are. This research was conducted by making a land use map that aims to see how the situation is in the field and compare it with a planning map using a Geographic Information System. The results of the comparison of the planning map and the conditions in the field show the suitability of land use. The results obtained using Tapin's RTRWK in IUP MINERBA are 15.22%, which means that the implementation of space utilization is not appropriate. The influencing factors are the development of settlements which are increasing every year very rapidly due to the increasing population. The positive impact is that the companies have helped to repair village roads that are used by the community to reduce the number of unemployed, increase regional income levels, and improve the economic welfare of the surrounding community. The negative impact is environmental damage and social conflict in the community, increasing the vulnerability to traffic accidents due to increased road users.

Keywords: spatial suitability; mining; RTRW

PENDAHULUAN

Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai provinsi yang kaya akan sumber alam terutama hasil tambang, juga tidak lepas dari permasalahan di bidang lingkungan. Masifnya aktivitas pertambangan di provinsi Kalimantan Selatan ini menyebabkan

kerusakan lingkungan dan hilangnya tutupan lahan di Kalimantan Selatan. Menurut kajian WALHI Kalimantan Selatan 2020, Kalimantan Selatan juga termasuk salah satu provinsi yang memiliki indeks rasio (ketimpangan) tertinggi di pulau Kalimantan. Meskipun terdapat perbaikan pada tahun 2019, namun melihat data pada tahun-tahun sebelumnya (2017 dan 2018) ketimpangan di provinsi ini merupakan yang terburuk dibandingkan provinsi-provinsi lainnya se-Kalimantan.

Perbaikan terdapat pada tahun 2019, namun melihat data pada tahun-tahun sebelumnya (2017 dan 2018) ketimpangan di provinsi ini merupakan yang terburuk dibandingkan provinsi-provinsi lainnya se-Kalimantan. Secara umum Kabupaten Tapin mengalami perkembangan cukup pesat pada kawasan hutannya, namun di sisi lain sebagai *issue* berkembang, masih adanya potensi sumberdaya alam yang belum termanfaatkan secara optimal, sehingga belum dapat mendukung upaya pengembangan wilayah secara maksimal. Menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2015, Kabupaten Tapin memiliki luas 2 174,95 km^2 yang terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kec. Binuang, Kec. Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan, Kec. Salam Babaris, Kec. Tapin Tengah, Kec. Bungur, Kec. Piani, Kec. Lokpaikat, Kec. Tapin Utara, Kec. Bakarangan, Kec. Candi Laras Selatan dan Kec. Candi Laras Utara. Dalam kabupaten tapin sediri terdapat 23 Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP MINERBA) ±14,75% dengan luas 32.083,36 Ha, sehingga perlunya dilakukan analisis mengenai kesesuaian RTRW di Kabupaten Tapin.

Pengertian tata ruang, diambil dari buku Pengantar Hukum Tata Ruang (2016) karya Yunus Wahid, merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Struktur ruang digambarkan melalui pengidentifikasian tempat, lintasan dan batas sebagai komponen utama, selanjutnya diorientasikan melalui hirarki dan jaringan atau lintasan. Struktur ruang adalah susunan pusat pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota). Usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum/badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia (Sukandarrumidi, 1998:252 dalam penelitian Dewi. A, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial narasi deskriptif, analisis kualitatif geografi dan analisis kuantitatif geografi.

a. Analisis spasial

Dari hasil *overlay* peta sebagai visualisasi hasil pengklasifikasian kesesuaian Tata ruang pada bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan tata ruang wilayah provinsi dan tata ruang wilayah kabupaten di Kabupaten Tapin Provinsi

Kalimantan Selatan. Teknik yang digunakan pada penelitian ini dalam pemilihan responden menggunakan *purposive sampling* yang dipilih dengan pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek penelitian yaitu :

1. Pekerja dinas PUPR yang mengetahui mengenai tata ruang Kabupaten Tapin
2. Pekerja dinas LH yang mengetahui mengenai evaluasi AMDAL dan pengawasan dampak lingkungan Kabupaten Tapin
3. Pekerja dinas Perhubungan yang mengetahui mengenai dampak lalu lintas deangan adanya investasi pertambangan
4. Pekerja dinas BPD yang mengetahui mengenai peningkatan pendapatan daerah dengan adanya investasi pertambangan

Hal pertama yang dilakukan pada pelaksanaanya adalah pengumpulan data-data spasial yang kemudian di *overlay* menjadi satu dalam peta. Dari peta tersebut kemudian dilakukan perhitungan luasan pada masing-masing data peta. Pada bagian peta yang tumpang tindih dengan kawasan di kalkulasi nilai luasanya kemudian di hitung presentase kesesuaian kawasan sehingga didapat data presentase kesesuaian kawasan tersebut (sesuai/tidak sesuai).

b. Analisis Kualitatif Geografi

Analisis kualitatif geografi adalah suatu project mengatur, melakukan manajemen, mengelompokkan dan menilai data dalam sudut pandang spasial. Analisis kualitatif hanya fokus pada satu permasalahan dalam setiap kajian. Unsur yang terdapat dalam analisis kualitatif geografi adalah tabulasi dan rekapitulasi data. Pengertian tabulasi data adalah pengelompokan berbagai data yang telah didapatkan di lapangan dalam bentuk sajian tabel. Tabulasi memiliki tujuan supaya data mudah terbaca secara tampilan sehingga tidak perlu deskripsi menyeluruh. Sedangkan pengertian rekapitulasi adalah penjumlahan dari skoring tabel berdasarkan kriteria tertentu. Tabulasi dan rekapitulasi tidak lengkap tanpa hadirnya reduksi data. Reduksi data adalah kegiatan menyempurnakan hasil penelitian dengan cara mencari sumber lain dari berbagai pihak terkait.

c. Analisis Kuantitatif Geografi

Jenis kedua dari penelitian geografi adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk memecahkan permasalahan dari penelitian yang bertajuk analisis keruangan, analisis ekologi dan analisis kompleks wilayah. Metode analisis kuantitatif terdapat ciri khas yaitu penyempatan hipotesis dalam setiap karya. Hipotesis mengandung definisi bahwa setiap karya harus diselingi berbagai kemungkinan yang terjadi sebelum mencantumkan hasilnya. Biasanya, dalam analisis kuantitatif geografi banyak terdapat ilmu hitung di dalamnya. Jika lemah dalam matematika dan kurang menguasai pembelajaran tentang excel tidak disarankan mengambil kuantitatif geografi. Namun dalam kajian ilmu kuantitatif terdapat keuntungan yaitu validitas data mudah untuk didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP MINERBA) dapat diberikan kepada Investor berdasarkan acuan RTRWK Tapin dan RTRWP Kalimantan Selatan. Peta Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP MINERBA) pada Gambar 1 dan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP MINERBA) di Kabupaten Tapin pada Tabel 1.

Tabel 1. Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP MINERBA) di Kabupaten Tapin

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)
1	CV. Amira	34,34
2	CV. Anshari Jaya	253,05
3	PT. Antang Gunung Meratus	5.552,69
4	PT. Anugerah Tujuh Sejati	103,22
5	PT. Bangun Banua Persada Kalimantan	5.075,15
6	PT. Baramarta	23,02
7	PT. Belawaian Energi Prima	1.838,38
8	PT. Berkat Murah Rejeki	100
9	PT. Bhumi Rantau Energi	2.087,17
10	PT. Binuang Mitra Bersama	3.434,88
11	CV. Dewi Sartika	29,35
12	PT. Energi Batubara Lestari	1.886,40
13	PT. Energi Bumi Tapin	198,7
14	PT. Kalimantan Prima Persada	49,86
15	CV. Karyati	92,51
16	PT. Kogarperdana Murni	497,38
17	KUD. Makmur	76,52
18	PT. Putra Banua Tapin	196,97
19	PT. Sumber Kurnia Buana	9.647,53
20	CT. Supernova Industri Prima	0,2
21	PT. Tanjung Alam Jaya	96,84
22	PT. Tanjung Alam Jaya	191,43
23	CV. Tiga Serangkai Binuang	573,77
	Total	**30.039,37**

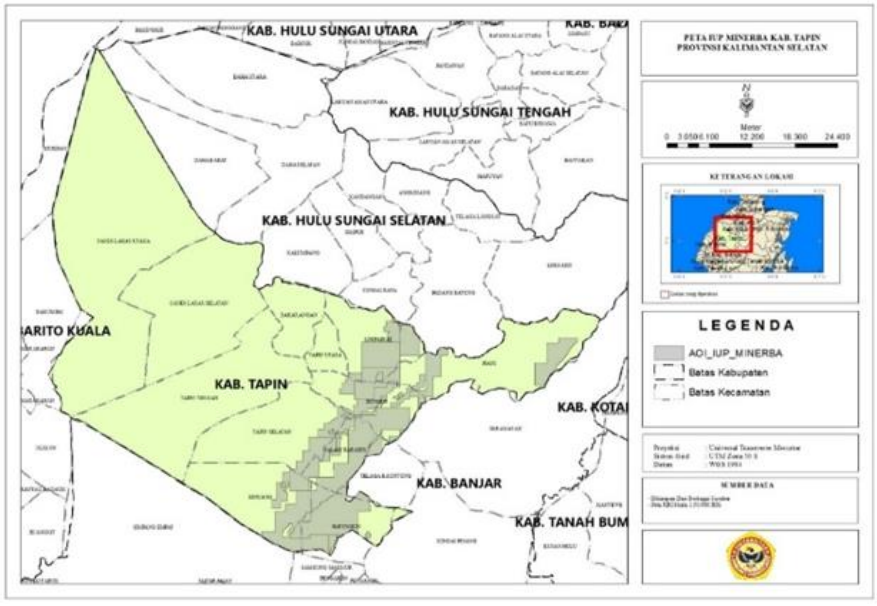

Gambar 1. Peta Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP MINERBA)

Peta Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP MINERBA) berdasarkan RTRWP Kalimantan Selatan dapat di lihat pada Gambar 2.

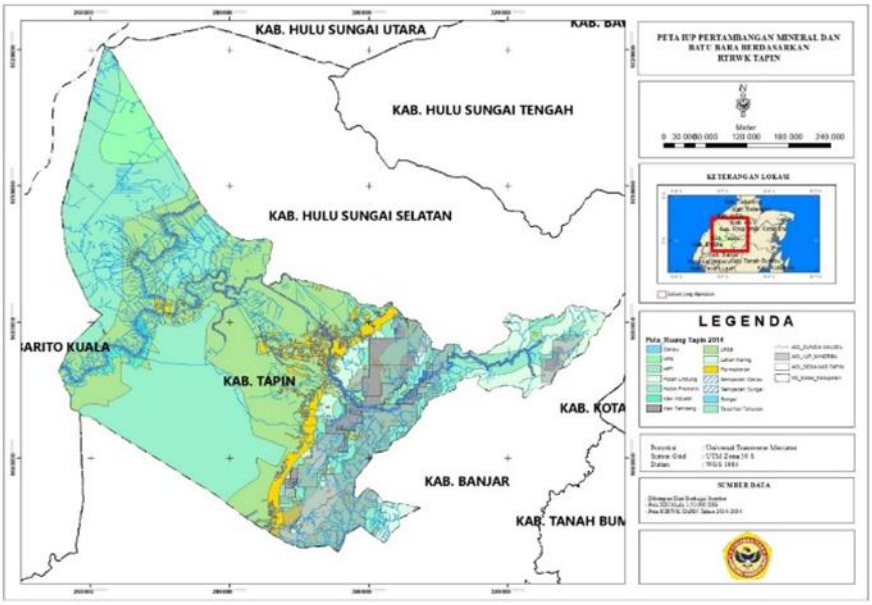

Gambar 2. Peta Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP MINERBA) berdasarkan RTRWP Kalimantan Selatan

Dari kedua data diatas terdapat beberapa ketidaksesuaian antara IUP MINERBA dengan RTRWK Tapin pada Gambar 5.

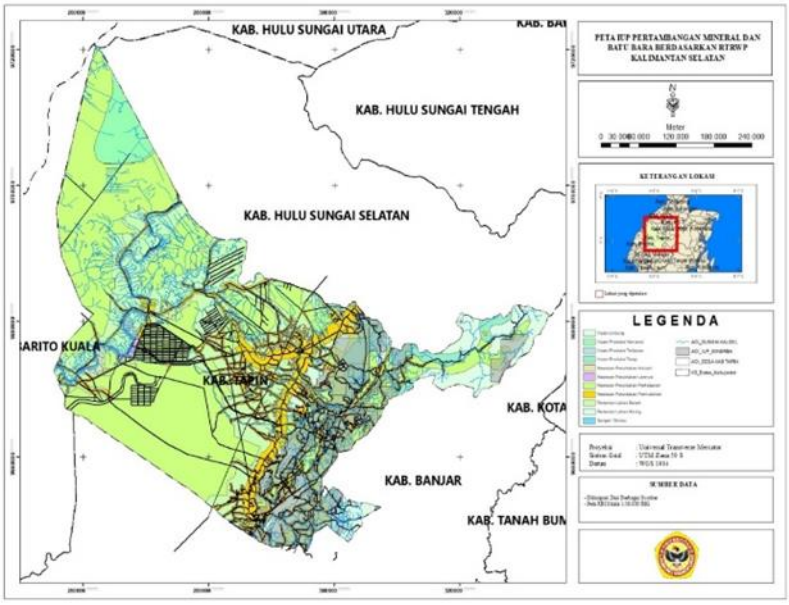

Gambar 3. Peta Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP MINERBA) berdasarkan RTRW Tapin

Tabel 2. Luasan RTRWK Tapin

No	Fungsi	Luas (Ha)	RTRW Kab
1	Hutan Produksi Tetap	923,56	HPT
2	Danau	9,71	Danau
3	HPK	7.291,76	HPK
4	Hutan Lindung	11.362,19	HL
5	Hutan Produksi	6.858,69	HP
6	Kaw Industri	1.540,30	Industri
7	Kaw Tambang	6.188,01	Tambang
8	Lahan Kering	8.280,85	LH
9	LP2B	64.098,28	Pertanian
10	Permukiman	10.854,47	Permukiman
11	Sempadan Danau	27,72	Semp Danau
12	Sempadan Sungai	3.579,82	Semp Sungai
13	Sungai	1.735,01	Sungai
14	Tanaman Tahunan	94.421,80	Perkebunan
	Total	**217.172,16**	

Analisis data yang didapat dari luasan RTRWK Tapin yaitu dengan luasan Hutan Produksi Tetap 923,59 , Danau 9,71 Ha, HPK 7.291,76 Ha, Hutan Lindung 11.362,19 Ha, Hutan Produksi 6.858,69 Ha, Kaw Industri 1.540,30 Ha, Kawasan Tambang 6.188,01 Ha, Lahan Kering 8.280,85 Ha, LP2B 64.098,28 Ha, Permukiman 10.854,47 Ha, Sempadan Danau 27,72 Ha, Sempadan Sungai 3.579,82 Ha, Sungai 1.735,01 Ha, Tanaman Tahunan 94.421,80 Ha. Sehingga di dapatkan total luasan RTRWK Tapin yaitu 217.172,16. Luasan RTRWK Tapin dalam IUP MINERBA dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Luasan RTRWK Tapin dengan IUP MINERBA

No	Fungsi	Luas (Ha)	RTRWK TAPIN
1	Hutan Produksi Tetap	206,92	HPT
2	Danau	9,71	Danau
3	Lahan Kering	4.452,56	HPK
4	Kawasan Tambang	5.571,29	HL
5	Tanaman Tahunan	13.299,19	HP
6	LP2B	113	Industri
7	Sempadan Danau	26,9	Tambang
8	Permukiman	1.500,48	LH
9	Sempadan Sungai	439,97	Pertanian
10	Sungai	123,52	Permukiman
11	Hutan Produksi	5.726,05	Semp Danau
12	Hutan Lindung	231,45	Semp Sungai
	Total	**31.701,04**	

Analisis data yang didapat dari luasan RTRWK Tapin dalam IUP MINERBA yaitu dengan luasan Hutan Produksi Tetap 206,92 Ha, Danau 9,71 Ha, Lahan Kering 4.452,56 Ha, Kawasan Tambang 5.571,29 Ha, Tanaman Tahunan 13.299,19 Ha, LP2B

113,00 Ha, Sempadan Danau 26,90 Ha, Permukiman 1.500,48 Ha, Sempadan Sungai 439,97 Ha, Sungai 123,52 Ha, Hutan Produksi 5.726,05 Ha, Hutan Lindung 231,45 Ha. Sehingga didapatkan total luasan RTRWK Tapin dalam IUP MINERBA yaitu 31.701,04 Ha.

Presentase Penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Tapin dalam Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP MINERBA) pada Tabel 4.

Tabel 4. Presentase Penggunaan RTRWK Tapin dengan IUP MINERBA

No	Fungsi	Luas dalam RTRWK Tapin (Ha)	Luas RTRWK Tapin dalam IUP MINERBA (Ha)	Presentase Penggunaan RTRWK dengan IUP MINERBA (%)
1	Hutan Produksi Tetap	923,56	206,92	22,4
2	Danau	9,71	9,71	100
4	Hutan Lindung	11.362,19	231,45	2,04
5	Hutan Produksi	6.858,69	5.726,05	83,49
7	Kaw Tambang	6.188,01	5.571,29	90,03
8	Lahan Kering	8.280,85	4.452,56	53,77
9	LP2B	64.098,28	113	0,18
10	Permukiman	10.854,47	1.500,48	13,82
11	Sempadan Danau	27,72	26,9	97,04
12	Sempadan Sungai	3.579,82	439,97	12,29
13	Sungai	1.735,01	123,52	7,12
14	Tanaman Tahunan	94.421,80	13.299,19	14,08
Total		**208.340,11**	**31701,04**	**15,22**

Analisis data yang didapat dari persentase penggunaan RTRWK Tapin dalam IUP MINERBA yaitu Hutan Produksi Tetap 22,40%, Danau 100%, Hutan Lindung 2,04%, Hutan Produksi 2,04%, Kaw Tambang 90,03%, Lahan Kering 53,77%, LP2B 0,18%, Permukiman 13,82%, Sempadan Danau 97,04%, Sempadan Sungai 12,29%, Sungai 7,12%, Tanaman Tahunan 14,08%. Sehingga di dapatkan total dari persentase penggunaan RTRWK Tapin dalam IUP MINERBA yaitu 15,22 %. Berdasarkan tabel klasifikasi hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, maka didapat tingkat kesesuaian ruang tidak berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan polar ruang dalam RTR, sehingga harus membuat kebijakan dan strategi baru atau melakukan revisi total RTR melalui upaya peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.

Luasan RTRWP Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin dalam IUP MINERBA pada Tabel 5.

Tabel 5. Luasan RTRWP Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin dalam IUP MINERBA

No	RTRWP KalSel	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	1.386,66
2	Hutan Produksi Terbatas	228,14
3	Hutan Produksi Tetap	4.268,47
4	Kawasan Peruntukan Lainnya	109,52
5	Kawasan Peruntukan Perkebunan	12.497,07
6	Kawasan Peruntukan Permukiman	9.643,23
7	Pertanian Lahan Basah	53,59
8	Pertanian Lahan Kering	3.598,55
Total		**31.785,24**

Analisis data yang didapat dari luasan RTRWP Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin dalam IUP MINERBA yaitu dengan luasan Hutan Lindung 1.386,66 Ha, Hutan Produksi Terbatas 228,14 Ha, Hutan Produksi Tetap 4.268,47 Ha, Kawasan Peruntukan Lainnya 109,52 Ha, Kawasan Peruntukan Perkebunan 12.497,07 Ha, Kawasan Peruntukan Permukiman 9.643,23 Ha, Pertanian Lahan Basah 53,59 Ha, Pertanian Lahan Kering 3.598,55 Ha. Sehingga di dapatkan total luasan RTRWP Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin dalam IUP MINERBA yaitu 31.785,24 Ha.

Luasan RTRWP Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Luasan RTRWP Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin

No	RTRWP KALSEL	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi Konversi	6.522,15
2	Hutan Lindung	11.321,53
3	Hutan Produksi Konversi	220,08
4	Hutan Produksi Terbatas	949,87
5	Hutan Produksi Tetap	7.206,92
6	Kawasan Peruntukan Industri	1.177,62
7	Kawasan Peruntukan Lainnya	585,35
8	Kawasan Peruntukan Perkebunan	105.403,97
9	Kawasan Peruntukan Permukiman	40.881,72
10	Pertanian Lahan Basah	37.234,00
11	Pertanian Lahan Kering	5.059,44
12	Sungai / Danau	614,92
	Total	**217.177,58**

Analisis data yang didapat dari luasan RTRWP Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin yaitu Hutan Produksi Konversi 6.522,15 Ha, Hutan Lindung 11.321,53 Ha, Hutan Produksi Konversi 220,08 Ha, Hutan Produksi Terbatas 949,87 Ha, Hutan Produksi Tetap 7.206,92 Ha, Kawasan Peruntukan Industri 1.177,62 Ha, Kawasan Peruntukan Lainnya 585,35 Ha, Kawasan Peruntukan Perkebunan 105.403,97 Ha, Kawasan Peruntukan Permukiman 40.881,72 Ha, Pertanian Lahan Basah 37.234 Ha, Pertanian Lahan Kering 5.059,44 Ha, Sungai/Danau 614,92 Ha. Sehingga didapatkan total luasan RTRWP Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin yaitu 217.177,58 Ha.

Persentase penggunaan RTRWP Tapin dalam IUP MINERBA pada Tabel 7.

Tabel 7. Presentase Peggunaan RTRWP Tapin dalam IUP MINERBA

No	RTRWP KalSel	Luas RTRWP KalSel di Kab. Tapin	Luas RTRWP KalSel di Kab. Tapin dalam IUP Minerba	Persentase Penggunaan RTRWP dengan IUP MINERBA (%)
1	Hutan Lindung	11.321,53	1.386,66	12,25
2	Hutan Produksi Terbatas	949,87	228,14	24,02
3	Hutan Produksi Tetap	7.206,92	4.268,47	59,23
4	Kawasan Peruntukan Lainnya	585,35	109,52	18,71
5	Kawasan Peruntukan Perkebunan	105.403,97	12.497,07	11,86
6	Kawasan Peruntukan Permukiman	40.881,72	9.643,23	23,59

No	RTRWP KalSel	Luas RTRWP KalSel di Kab. Tapin	Luas RTRWP KalSel di Kab. Tapin dalam IUP Minerba	Persentase Penggunaan RTRWP dengan IUP MINERBA (%)
7	Pertanian Lahan Basah	37.234,00	53,59	0,14
8	Pertanian Lahan Kering	5.059,44	3.598,55	71,13
Total		**208.642,81**	**31.785,24**	**15,23**

Analisis data yang didapat dari Presentase Penggunaan RTRWP Tapin dalam IUP MINERBA yaitu 12,25% Hutan Lindung, 24,02% Hutan Produksi Terbatas, 59,23% Hutan Produksi Tetap, 18,71% Kawasan Peruntukan Lainnya, 11,86% Kawasan Peruntukan Perkebunan, 23,59% Kawasan Peruntukan Permukiman, 0,14% Pertanian Lahan Basah, 71,13% Pertanian Lahan Kering. Sehingga di dapatkan total dari Presentase Penggunaan RTRWK Tapin dalam IUP MINERBA yaitu 15,23 %. Berdasarkan tabel klasifikasi hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, maka didapat tingkat kesesuaian ruang tidak berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan polar ruang dalam RTR, sehingga harus membuat kebijakan dan strategi baru atau melakukan revisi total RTR melalui upaya peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian RTRW pada bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan RTRWK di Kabupaten Tapin dan RTRWP di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu salah satunya perkembangan pemukiman yang meningkat setiap tahunnya yang sangat pesat di karenakan jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat sehingga berpengaruh terhadap kesesuaian RTRW pada lahan pertanian, perkebunan dan lain-lain. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Noor Fuadi,ST di dinas Perhubungan yaitu dalam proses pemberian izin usaha pertambangan terdapat mekanisme yang harus diikuti salah satunya mendapat surat rekomendasi dari dinas PUPR atas izin yang diajukan oleh perusahaan.

Dari data-data di atas dapat diketahui seberapa besar dampak dari kesesuaian RTRW pada bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan RTRWK di Kabupaten Tapin dan RTRWP di Provinsi Kalimantan Selatan baik postif maupun negatif. Adapun beberapa dampak positif dari kesesuaian RTRW pada bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan RTRWK di Kabupaten Tapin dan RTRWP di Provinsi Kalimantan Selatan yang di dapat berdasarkan wawancara di dinas Perhubungan dengan Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan ibu Rusita Hieldayati, ST yaitu para perusahaan ikut membantu memperbaiki jalan-jalan desa yang digunakan masyarakat. Dampak positif lain menurut Staf BAPEDA, bapak Kadim yang di lakukan dengan wawancara di Balai Pendapatan Daerah yaitu dapat mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan tingkat pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Dampak negatif dari kesesuaian RTRW pada bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan RTRWK di Kabupaten Tapin dan RTRWP di Provinsi Kalimantan Selatan yang di dapat berdasarkan wawancara di dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup ibu Noorcipta

Ningsih, S.T yaitu kerusakan lingkungan dan konflik sosial masyarakat. Dampak negatif lain dari kesesuaian RTRW pada bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan RTRWK di Kabupaten Tapin dan RTRWP di Provinsi Kalimantan Selatan yang di dapat berdasarkan wawancara di dinas Perhubungan dengan Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan ibu Rusita Hieldayati, ST yaitu meningkatnya kerawanan kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan penguna jalan.

KESIMPULAN

Total dari Presentase Penggunaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Tapin dalam Ijin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (IUP MINERBA) yaitu 15,22 %. Berdasarkan tabel klasifikasi hasil evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang, maka didapat tingkat kesesuaian ruang tidak berkualitas, artinya pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana struktur dan polar ruang dalam Rencana Tata Ruang (RTR), sehingga harus membuat kebijakan dan strategi baru atau melakukan revisi total Rencana Tata Ruang (RTR) melalui upaya peninjauan kembali rencana struktur dan pola ruang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian RTRW pada bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan RTRWK di Kabupaten Tapin dan RTRWP di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu salah satunya perkembangan pemukiman yang meningkat setiap tahunnya yang sangat pesat di karenakan jumlah populasi penduduk yang semakin meningkat sehingga berpengaruh terhadap kesesuaian RTRW pada lahan pertanian, perkebunan dan lain-lain.

Dampak positif dari kesesuaian RTRW pada bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan RTRWK di Kabupaten Tapin dan RTRWP di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu para perusahaan ikut membantu memperbaiki jalan-jalan desa yang digunakan masyarakat dapat mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan tingkat pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Dampak negatif dari kesesuaian RTRW pada bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan RTRWK di Kabupaten Tapin dan RTRWP di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu kerusakan lingkungan dan konflik sosial masyarakat meningkatnya kerawanan kecelakaan lalu lintas akibat peningkatan penguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Bumbu, Produksi Batubara Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Menurut Kecamatan Lokasi Penambangan di Kabupaten Tanah Bumbu 2015, BPStanahbumbu.go.id., 2017, diakses pada 5 maret 2023, di tautan: https://tanahbumbukab.bps.go.id/statictable/2017/06/13/911/produksibatubara-perusahaan-pemegang-izin-usaha-pertambanganoperasi-produksi-iup-op-menurut-kecamatan-lokasipenambangan-di-kabupaten-tanah-bumbu-2015.html

Banjarmasin.co.id., Kerusakan Alam Bisa Makin Parah, Tribunbanjarmasin.Com, 2016, diakses pada 5 maret 2023, di tautan: https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/30/ kerusakan-alam-bisa-makin-parah.

Cronbach, L. J. (1982). "Designing evaluations of educational and social programs". San Francisco: Jossey-Bass

Dewi, A., "Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Usaha Pertambangan Di

Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang" Skripsi UNES 2018

Diananta, Ketimpangan Pendapatan Kalsel Terburuk di Kalimantan, Kumparan, disadur dari Banjarhits, 2018, diakses 5 maret 2023, di tautan: https://kumparan.com/banjarhits/ketimpangan-pendapatan-di-kalsel-terburuk-se-kalimantan/ full

Fachlevi, T. A., Putri, E. I., & Simanjuntak, S. M. (2015). Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kecamatan Mereubo. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, 2(2), 170-179.

Ferry, 2010. Kinerja Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Greenpeace Indonesia. (2018, December 17). Pengaruh Elite Politik Dalam Pusaran Bisnis Batubara. Retrieved August 2020, from Greenpeace Indonesia: https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/1016/pengaruh-elite-politik-dalampusaran-bisnis-batubara/

Gunara, M. (2017). Potensi Batubara Sebagai Sumber Energi Alternatif Untuk Pengembangan Industri Logam. Seminar Nasional Teknoka, 2, 23-27

IESR. (2019). Indonesia's Coal Dynamics: Toward A Just Energy Transition. Jakarta: Institute for Essential Services Reform (IESR).

Indonesia Investments. (2018, April 5). https://www.indonesiainvestments.com/business/commodities/coal/item236. Retrieved August 2020, from Indonesia Investments: https://www.indonesia-investments.com/business/commodities/coal/item236

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Reyes, A. d. (2020, July 9). Indonesia's coal reserves rise. Retrieved August 2020, from Argus Media: https://www.argusmedia.com/en/news/2121640-indonesias-coal-reserves-rise

Rohaya, P., "Aluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamobagu Tahun 2014 – 2034" *Jurnal Spasial Vol 6. No. 1*, 2019

Rustiadi, E., Saefulhakim, S. dan Panuju, D.R. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. CrestPent. Press. Bogor.

Thorndike, R. M., Cunningham, G. K., Thorndike, R. L., & Hagen, E. P. 1991. Measurement and Evaluation in Psychology and Education (5th ed.). New York: Macmillan Publishing Co, Inc.

Tyler, R. 1950. Models of Teaching. New Yersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

WALHI Kalimantan Selatan 2020. Carut Marut Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara di Kalimantan Selatan. *Jurnal Walhi Kalsel hal 9*